

RAPAT KOORDINASI COMMUNITY DEVELOPMENT DAN SHARING PEMBELAJARAN PROGRAM ACCESS Tahap II

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa/Kelurahan (BPMPD/K)

HOTEL CELEBES MAKASSAR, 18 – 19 MEI 2010



Australia Indonesia Partnership

Kemitraan Australia Indonesia



IDSS

a world where aid is no longer needed

An **arecon** company



KATA PENGANTAR

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sharing Pembelajaran Program ACCESS Phase II, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan (BPMPD/K) serta Organisasi Masyarakat Sipil sebagai mitra telah berlangsung pada tanggal 18 – 19 Mei 2010 di Hotel Celebes Makassar, dan sebagai pelaksana utama adalah BPMPD/K Propinsi Sulawesi Selatan. Laporan ini merupakan hasil catatan proses yang berlangsung selama pertemuan, baik itu berupa penjelasan tambahan yang telah disampaikan, dalam penjelasan juga telah dilengkapi informasi terhadap jalanya pertemuan, bahan-bahan materi presentasi dari para narasumber agar mampu memberikan gambaran yang lebih komplit guna memenuhi keingin-tahuan tentang pertemuan ini. Sekalipun demikian, laporan ini tentu tidak mampu secara sempurna mencatat apa yang telah terjadi, sehingga dalam beberapa hal informasi yang disampaikan pasti akan nampak terpenggal dan sedikit sulit difahami. Namun secara keseluruhan proses dan hasilnya telah tertuang didalam uraian.

Dari pengalaman selama mengorganisir pertemuan ini dan menyimak hasil diskusi yang terjadi selama pertemuan, tim ACCESS Sulawesi Selatan mencoba untuk mendokumentasikan agar dapat dipergunakan sebagai proses pembelajaran yang mampu diingat yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan refleksi. Dalam laporan juga dicantumkan foto hasil dokumentasi pada posisi yang sesuai dengan kejadian sebagaimana diuraikan pada sekitar foto ditempatkan. Sehingga dengan akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap apa yang sesungguhnya terjadi. Tak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam menyusun pelaporan ini, tak lepas dari peran banyak pihak, yang patut untuk disebutkan diantaranya: anggota tim ACCESS Sulsel, staf YASPINDO yang secara kusus dengan rajin membantu proses pencatatan, juga fasilitator pertemuan dengan rumusan kesimpulan dan para narasumber yang telah mempersiapkan bahan untuk presentasi.

Harus diakui bahwa keberhasilan penyelenggaraan pertemuan ini, tak lepas dari dukungan pihak BPMPD/K Propinsi Sulawesi Selatan, baik kepanitiaan maupun pendanaan. Sekalipun kata-kata tak mencukupi untuk mengungkapkan hal tersebut, namun dengan rasa jujur tim ACCESS Sulsel mengucapkan ucapan terima kepada tim dari BPMPD/K, beserta jajaranya yang sudi memfasilitasi proses pertemuan, kepada para Narasumber dan seluruh peserta yang terlibat sehingga Pertemuan Koordinasi dan Sharing Pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Makassar, 28 April 2009

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan Pertemuan	4
C. Proses dan Hasil Pertemuan	4
1. Proses dan Hasil Hari I	5
1.1 Pembukaan	5
1.2 Sambutan Wakil ACCESS	6
1.3 Sambutan Kepala BPMPDK	6
1.4 Pameran Hasil Program Kerjasama ACCESS Pemkab	8
2. Proses dan Hasil Hari II	10
2.1 Panel Diskusi BUMDes dan Perencanaan Partisipatif	10
2.2 Catatan Fasilitator/Moderator	15
2.3 Tanggapan Peserta	16
2.4 Jawaban/Klarifikasi Narasumber	18
2.5 Masukan dari KEMENDAGRI	19
2.6 Diskusi Kelompok	24
2.7 Penutupan	28
D. Peserta Pertemuan	29
E. Moderator/Fasilitator	29
 Lampiran # 1: Agenda Pertemuan	

LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI COMMUNITY DEVELOPMENT DAN SHARING PEMBELAJARAN PROGRAM ACCESS PROPINSI SULAWESI SELATAN.

A. LATAR BELAKANG

Upaya untuk meningkatkan dampak pembangunan, dengan memperkenalkan paradigma pendekatan baru, telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak agar manfaat pembangunan betul betul tepat sasaran, yakni pada mereka yang membutuhkan. Demikian pula ACCESS (Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme) telah pula memperkenalkan dan mendukung berbagai kegiatan yang diinisiasi dari local serta mendasarkan pada penerapan pendekatan didasarkan pada kekuatan yang dimiliki. Selain itu, kegiatan yang dilakukan juga menekankan pada upaya memberdayakan masyarakat terutama kelompok perempuan dan terpinggirkan agar mereka mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara aktif dalam menetapkan tujuan dan manfaat pembangunan desa. Dengan pemikiran bahwa, jika dibandingkan pihak luar, masyarakat setempat lebih paham bagaimana isu lokal berdampak pada mereka sendiri, maka partisipasi mereka menjadi sangat penting dalam kegiatan program. Masyarakat seringkali kekurangan informasi tentang bagaimana cara yang sebaiknya dalam menghadapi masalah tersebut. Kegiatan yang dikembangkan secara partisipatif akan memberikan kelompok masyarakat ini suatu kesempatan untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan membuat keputusan (*inform decision*) mengenai bagaimana mereka mengembangkan yang terbaik buat mereka sendiri. Selain itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat ini bukanlah suatu kegiatan yang hanya dilakukan dengan satu kali kegiatan saja, namun dilakukan dengan banyak kegiatan dan dilakukan review pada setiap waktu, sehingga ini merupakan bagian dari proses pemberdayaan, dimana sebagian atau seluruh bagian masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk mendukung perjuangan menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini dapat diartikan proses tersebut merupakan suatu lingkaran yang tak terputus dan terus menerus.

Beberapa hasil proses kegiatan, misalnya perencanaan partisipatif dengan pendekatan CLAPP-GSI (Community Learning and Participatory Process – Gender and Social Inclusive) telah dapat mewujudkan tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan yang disertai tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang kemudian diintegrasikan kedalam system Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasil lain adalah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 46 desa di Kabupaten Bantaeng dan Koperasi di 9 desa di Kabupaten Jeneponto juga akan mampu membantu mendorong kemandirian desa.. Pengalaman pelaksanaan kegiatan penerapan perencanaan partisipatif, pengembangan BUMDes, Lingkungan dan Pelayanan Publik setidaknya selalu diintegrasikan dengan pemerintah kabupaten sehingga

pelaksanaannya sangat membantu penerapan kebijakan pemerintah baik tingkat kabupaten maupun tingkat pusat.

Mempertimbangkan pentingnya pengalaman ini dan mencoba menggali masukan dari pengalaman kegiatan lain yang relevan, maka ACCESS bekerjasama dengan BPMPD Propinsi Sulawesi Selatan menganggap penting untuk menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi dan Sharing Pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Selatan agar hasil-hasil tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran sebagai bahan review dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota masing-masing.

B. TUJUAN PERTEMUAN

Secara umum tujuan Pertemuan Koordinasi dan Sharing Pembelajaran ini adalah: ***“BAPPEDA dan BPMPD dari 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan mengadopsi system perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya local yang ada”***.

Sedang secara khusus, pertemuan diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yakni peserta workshop mampu:

1. BAPPEDA dan BPMPD dari 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan berkomitmen untuk menerapkan hasil pembelajaran yang diperoleh terkait perencanaan pembangunan yang partisipatif dalam lembaga masing-masing.
2. BAPPEDA dan BPMPD dari 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan mengkomunikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh kepada berbagai SKPD dalam lingkup kabupaten/kota masing-masing.

C PROSES DAN HASIL PERTEMUAN

Pertemuan ini berlangsung selama 1,5 hari, yakni hari I dimulai siang hari dan peserta mulai check in dan hari II acara dilakukan sampai sore. Pada dasarnya kegiatan ini hanya mengacu pada 2 sesi utama, yakni:

1. Sharing pembelajaran tentang pelaksanaan perencanaan partisipatif dan upaya mengintegrasikannya kedalam system musrenbang daerah.
2. Rumusan masukan untuk pengintegrasian kegiatan perencanaan partisipatif kedalam system musrenbang daerah.

Dari kedua sesi utama tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan, ditempuh dengan beberapa bentuk kegiatan, proses dan hasil sebagai berikut:

1. Proses dan Hasil Hari I

Terdapat 2 kegiatan utama pada hari I, yakni acara pembukaan dan kemudian disusul dengan pameran hasil program ACCESS II yang telah dihasilkan oleh mitra LSM dari 4 kabupaten, Bantaeng, Jeneponto, Takalar dan Gowa.

1.1 Pembukaan.

Acara pembukaan diawali dengan laporan dari Penanggung Jawab kegiatan, yaitu Drs. Andi Sukri, dari BPMPDK Propinsi Sulawesi Selatan, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

Yang kami hormati,

- Para pimpinan SKPD Kabupaten/Kota
- Koordinator ACCESS Sulawesi Selatan
- Para Anggota LSM kerjasama ACCESS
- Hadirin dan Undangan



Salah satu kendala pembangunan di Sulawesi Selatan adalah masih tingginya penduduk yang termasuk dalam kategori miskin, meskipun dalam tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sekitar 14,57 persen, mengalami penurunan menjadi 14,11 persen pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 turun lagi menjadi 12,31 persen. Secara umum penduduk miskin di Sulawesi Selatan berada di wilayah perdesaan, khususnya pada

sektor pertanian.

Seiring dengan semakin menurunnya jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan dalam tiga tahun terakhir ini juga tergambar pada semakin membaiknya indikator-indikator makro sosial ekonomi, seperti Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Tingkat Melek Huruf, demikian hal dengan indikator-indikator makro lainnya.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Sharing informasi kebijakan pemerintah pusat
- 2) Sharing pengalaman mitra ACCESS dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan RPJMDes dan pembentukan BUMDes serta berbagai perangkat pendukung untuk kesinambungan RPJMDes dan BUMDes
- 3) Peserta NGO dan BPMPD Se-Propinsi memiliki bahan pembandingan serta gambaran singkat tentang proses persiapan masyarakat

1.2 Sambutan Wakil ACCESS Phase II

Sambutan ACCESS Phase II dilakukan oleh Koordinator Propinsi Sulawesi Selatan, yang pada intinya memberi penjelasan tentang ACCESS Phase II, khususnya terkait dengan: Tujuan Program ACCESS Phase II, Arah Strategis, Nilai-nilai bersama, Tujuan Khusus, Area Utama, dan Gambaran Hasil kegiatan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Mitra LSM Lokal.

1.3 Sambutan Kepala BPMPDK Propinsi Sulawesi Selatan

Sambutan Kepala BPMPDK diwakili oleh Drs. Sentot Irawan, MSi, sekretaris badan, yang secara rinci dapat dikutip sebagai berikut:

Selamat sore, salam sejahtera kita semua, izinkan saya membuka acara ini, dengan mengucapkan Bismillahir Rahmani Rahim.

**Program Strategis
Pemberdayaan Masyarakat
oleh BPMPDK Propinsi
Sulawesi Selatan**



1) VISI dan MISI BPMPDK Propinsi Sulawesi Selatan

Visi:

Terkemuka dalam Mendorong Keberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa Berbasis Kearifan Lokal

Misi:

- 1) Pengembangan otonomi desa
- 2) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
- 3) Peningkatan teknostruktur komunitas
- 4) Menyelenggarakan dan mengembangkan Training Of Trainer (TOT) bidang pemberdayaan masyarakat
- 5) Membangun sinergitas program pemberdayaan masyarakat dengan kabupaten/kota

2) KEBIJAKAN

1. Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal

2. Peningkatan Kualitas Teknostruktur Komunitas
3. Pembangunan Baruga Sayang (Pemberdayaan Komunitas Desa)
4. Pemberdayaan Perempuan

2) PROGRAM

1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan
3. Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Desa & Kelurahan
4. Pengembangan dan Pemanfaatan TTG
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
6. Pemb. Baruga Sayang (Pemberdayaan Komunitas Desa)
7. Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan

Kerjasama sekarang ini, merupakan best praktis, bahwa kehadiran perseorangan, kelompok, NGO, sedapat mungkin kita bisa dengarkan dan ambil jika itu baik, seperti Program ACCESS seperti yang telah dilakukan di Bantaeng dan Jeneponto, Kemarin saya mencoba melihat kegiatan yang ada di masing-masing SKPD, kalau dihitung semuanya tahun 2010 ada sekitar Rp 2 triliun, tetapi apa kita bisa lihat.

Pada pertemuan ini, diharapkan kedepan bekerja menjadi lebih smart (bekerja secara cermat dan cerdas)

1. Lakukan pekerjaan itu secara ikhlas
2. Ada 3 pendekatan dalam hidup ini:
 - a. Life is the shorty (hidup ini sangat pendek)
 - Penuhi hidup dengan ibadah
 - Tingkatkan ibadah kita kepada sesama manusia, dengan lingkungan.
 - b. Life is a Love (hidup ini penuh dengan cinta), power trans dimasyarakat itu susah, Saya pernah kemasyarakat bersama ACCESS – ibu Murni Almarhum, pelajaran yang saya peroleh adalah life is Love. Masyarakat begitu cepat datang untuk berdiskusi bersama kita, karena pendekatan yang dilakukan ibu Murni tidak membedakan masyarakat, sehingga mudah beradaptasi di masyarakat, ibu Murni tidak membedakan warga masyarakat yang satu dengan lainnya.
 - c. Life is Longer, bahwa hidup itu adalah perubahan, perubahan kedepan perubahan masa-masa yang akan datang.

Demikian, Terima Kasih

1.4 Pameran Hasil Program Kerjasama ACCESS – Pemkab - LSM

Usainya acara pembukaan, maka pemandu acara mempersilahkan peserta untuk melihat-lihat kegiatan pameran produk dokumentasi yang telah dihasilkan dengan dilaksanakannya kegiatan yang didukung ACCESS di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Takalar dan Gowa. Hasil-hasil yang ada diletakan dalam ruangan tersendiri di sebelah tempat pertemuan sehingga peserta dapat memperhatikan setiap saat ketika pelaksanaan sesi telah atau akan dilakukan. Dokumentasi kegiatan pameran sebagaimana dalam gambar berikut:





Pada saat melihat-lihat di area pameran, peserta secara otomatis akan tertarik untuk melihat hasil kegiatan yang dipajang

dan dijaga oleh staf mitra. Proses diskusi akan muncul antara peserta dan staf mitra. Dari penjelasan yang diberikan tersebut, ternyata memiliki dampak yang sangat berarti kepada peserta, ini diindikasikan dengan banyaknya peserta yang mengambil bahan pameran serta minta mengkopi elektronik file terkait dengan bahan pameran, seperti: dokumen RPJM, bulletin, brosure/leaflet, fact sheet dan file peta social.

2. Proses dan Hasil Hari ke II

2.1 Panel diskusi dengan Topik BUMDes dan Perencanaan Partisipatif.

Topik BUMDes mengambil kasus dari Kabupaten Bantaeng, dimana Pengembangan BUMDes merupakan bentuk kerjasama antara ACCESS – Pemkab Bantaeng – Jaringan (LSM). Menjadi narasumber dalam topic ini adalah Ramlan (Koordinator Program) dan Ir. Meryani MSi (Kepala BPMPD). Sedang topic Perencanaan Partisipatif mengambil kasus Kabupaten Jeneponto, yang merupakan kerjasama ACCESS - Pemerintah Kabupaten Jeneponto – Lembaga Mitra Turatea. Menjadi narasumber pada topic ini adalah Abdul Rahmat (Direktur LMT) dan Ir Sulaeman Natsir (staf BAPPEDA Jeneponto).

2.1.1 Rincian presentasi Pengembangan BUMDes oleh Ramlan

Pada saat ini kami masih melakukan kegiatan BUMDes, kegiatan ini adalah kerjasama ACCESS dengan Jaringan Mas.

A. Dasar pembentukan BUMDes adalah :

1. UU Nomor 32 pasal 213 tahun 2004
2. PP No. 72 tentang Desa
3. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan & Pengelolaan BUMDes
4. Surat Keputusan Bupati No. 411 tahun 2008 tentang petunjuk teknis pembentukan BUMDes



B. Bagaimana titik singgung Visi PEMKAB Bantaeng dengan DCEP.

Visi Kabupaten Bantaeng adalah Menjadi Daerah Terkemuka Berbasis Desa Mandiri Tahun 2013

Visi DCEP adalah Terlembagakannya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Melalui BUMDes yang Transparan , Demokratis, Partisipatif dan Berbasis Potensi

ini berarti bagaimana memberdayakan badan usaha milik desa. Jaringan melakukan pendampingan pada masyarakat khususnya BUMDes. Jaringan bersama pemerintah

Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pembinaan di 46 desa. Selain Bumdes salah satu indikator untuk melihat apakah desa benar-benar mandiri atau tidak. Ada banyak kegiatan ekonomi didesa, akan tetapi berjalan sendiri, oleh karena itu BUMDes diharapkan menghimpun kegiatan ekonomi/usaha yang ada didesa sebagai potensi desa. Selain itu juga diharapkan BUMDes menekan persaingan kegiatan usaha-usaha yang ada di desa, dan melepas masyarakat/petani dari jeratan rentenir.

C. Tahapan pembentukan BUMDes

1. Persiapan sosial, tahapan ini merupakan langkah awal rencana pembentukan BUMDes terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Melakukan peninjauan potensi ekonomi desa, misalnya sumberdaya yang dimiliki desa baik potensi alam, manusia dan sosial budaya yang ada.
3. Membangun komitmen dengan masyarakat melalui musyawarah desa.
Peserta musyawarah: pemerintah desa, perwakilan perempuan, kelompok penggiat usaha, tokoh masyarakat dll, sebelumnya dilakukan pemetaan tokoh kunci.
4. Penetapan bersama masyarakat yang dibuktikan dengan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes serta SK Kepengurusan BUMDes.

D. Strategi

1. Penyusunan modul pengembangan BUMDes
2. Pelatihan tehknik fasilitasi dan penguatan kelembagaan bagi pendamping. Pendamping memahami prosedur pembentukan BUMDes dan bagaimana melakukan fasilitasi dimasyarakat.
3. Pelatihan penguatan kelembagaan dan pengelolaan asset
4. Fasilitasi pengutan kelembagaan BUMDes
5. Fasilitasi proses penyusunan aturan BUMDes (AD/ART)
6. Fasilitasi proses penyusunan Rencana Kegiatan Usaha (RKU) dan standar operasional prosedur (SOP)
7. Negosiasi dan koordinasi parapihak
8. Workshop membangun komitmen parapihak. Dalam workshop ini melahirkan berbagai rekomendasi, indikatornya: pemerintah kabupaten saat ini mengalokasikan anggaran APBD sebesar 100 juta/BUMDes, Pembinaan langsung oleh Bank BPD Kab. Bantaeng. Walaupun BUMDes belum maksimal dalam membngun usahanya, saat masih dalam pembenahan administrasi lembaga.

2.1.2 Kepala BPM-PD kabupaten Bantaeng (Ibu Meryani, M.Si)

- Setelah melihat regulasi, sehingga kami membentuk lembaga ekonomi desa. Dan diharapkan dengan adanya BUMDes ini, akan melindungi para petani pada saat panen gagal (tidak mendapatkan apa-apa). Sehingga dengan adanya BUMDes ada kesinambungan program. Sebab jika selesai program, pengalaman habis pula kegiatan itu. Ada beda BUMDes dengan koperasi, pengurus BUMDes dipilih langsung oleh masyarakat.



- Tahun 2009 pemkab, melakukan pelatihan untuk memperkuat lembaganya, kemudian difasilitasi untuk membuat AD dan ART. Kemudian ada modul untuk pembentukan BUMDes dan kefasilitatoran dan pengembangan BUMDes, semuanya ada modul yang permanen. BUMDes 46 desa di Kabupaten Bantaeng sudah di Akte Notariskan.
- Sebelum turun dananya ini, dari BUMDes diharuskan membuat study kelayakan usaha.
- Kemudian Bagaimana SKPD kita gugah untuk membina BUMDes kita melakukan Roadshow untuk melakukan kerjasama para pihak, untuk membina BUMDes.
- Diharapkan dengan adanya BUMDes dapat membantu pemerintah untuk mendorong pemanfaatan hasil pembangunan oleh pemerintah di masyarakat. Misalnya ada sarana PAM, dibangun di desa maka peran BUMDes sangat diharapkan, Turbin yang dibangun, juga diharpkan BUMDes akan melakukan kesinambungan itu dan lain-lain.
- Saya juga berterima kasih kepada ACCESS karena BUMDes tidak akan cepat seperti ini jika tidak dibantu selama ini, termasuk pada LSM lokal di Bantaeng.

2.1.3 Rincian Presentasu Abdul Rahmat (Direktur LMT)

Perencanaan yang bertumpu pada peran utama warga di Kabupaten Jeneponto

- A. Pertanyaan kritis adalah Mengapa kita harus melakukan Perencanaan Partisipatif ?
1. Mengikuti petunjuk resmi sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007
 2. Perencanaan partisipatif merupakan model dan pendekatan baru yang bagus untuk direplikasi

3. Semua lembaga donor mempersyaratkan aspek partisipatif untuk mendapatkan bantuan dana

B. Sebagai Konsekwensi Maka:

1. Masyarakat berperan sangat penting dalam proses perencanaan di tingkat warga. Intinya adalah kewenangan sepenuhnya kepada warga untuk membuat dan menyusun perencanaan yang sesuai dengan kehendak semua warga



2. Setiap Daerah (kabupaten/kota) harus mengakomodir perihal hasil perencanaan desa tersebut terdalam Peraturan Daerah
3. Pemerintah Desa diwajibkan untuk membuat perencanaan tersebut dalam bentuk Dokumen Perencanaan Strategis Desa (dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

Sehingga untuk sementara disimpulkan bahwa **perencanaan partisipatif** adalah: Pelaksanaan perencanaan partisipatif dilakukan karena memang pemerintahan desa sangat membutuhkannya. Pengalaman menunjukkan bahwa desa yang memiliki RPJMDes dapat lebih *survive* dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi di tingkat desa sehingga desa lebih kuat. Perencanaan Partisipatif dilakukan bukan karena trend, bukan karena donor atau sekedar mengikuti petunjuk resmi

C. Perencanaan Partisipatif dilakukan karena :

1. Metodologi partisipatif menjamin keterlibatan aktif dari kelompok miskin dan perempuan. Dengan pemikiran bahwa, jika dibandingkan pihak luar, masyarakat setempat lebih paham bagaimana isu lokal berdampak pada mereka sendiri.
2. Perencanaan partisipatif akan memberikan kelompok masyarakat suatu kesempatan untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan membuat keputusan (*inform decision*) mengenai bagaimana mereka mengembangkan yang terbaik buat mereka sendiri.
3. Perencanaan partisipatif merupakan inti dari strategi pembangunan nasional serta memiliki payung hukum yang jelas (terutama UU No. 25 tahun 2004, terkhusus pada Permendagri No. 66 Tahun 2007).

D. Sebagai catatan adalah :

1. Perencanaan dan penganggaran harus bertumpu dan berpihak pada peran warga.
2. Dokumen RPJMDes mutlak disusun dengan mengedepankan aspek partisipatif, melibatkan orang miskin, perempuan dalam proses dan pelaksanaannya.
3. Kolaborasi para pihak (stakeholder) terutama di level pemerintahan desa sampai level kabupaten untuk berkomitmen melaksanakan hasil-hasil perencanaan partisipatif yang telah dihasilkan dalam dokumen RPJMDes
4. Dokumen RPJMDes harus dikuatkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes)
5. Perencanaan strategis desa harus terkoneksi dengan perencanaan daerah

E. Disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif dilakukan karena pemerintah desa

1. Perencanaan partisipatif dilakukan karena metodologi menjamin keterlibatan aktif masyarakat dikelompok.
2. Perencanaan partisipatif karena merupakan inti pembangunan nasional dan punya payung hukum yang jelas.
3. Perencanaan harus bertumpu pada warga
4. Kolaborasi para pihak mulai dari desa, sampai kabupaten.
5. Perencanaan desa harus berkoneksi dengan perencanaan kabupaten.
6. Satu desa satu dokumen perencanaan desa.

F. Mengapa satu dokumen perencanaan di Desa untuk semua program yaitu:

1. Menghindari tumpah tindih program
2. Perencanaan tanpa data, akan menghabiskan anggaran
3. Mengembalikan otonomi desa

G. Pengalaman Kemitraan ACCESS-Pemkab Jeneponto-Lembaga Mitra Turatea

<u>Tahun</u>	<u>ACCESS</u>	<u>Pemkab Jeneponto</u>	<u>Mitra Turatea</u>
1. 2007	Rp. 500.010.000,-	Rp. 500.000.000,-	--
2. 2008	Rp. 299.431.500,-	Rp. 178.415.000,-	--
3. 2009	Rp. 659.135.000,-	Rp. 241.640.000,-	Rp. 80.490.000,-

Catatan :

1. Tahun 2007, data peringkat kesejahteraan penduduk Jeneponto, 10 dokumen RPJMDes (Co Sharing ACCESS dan PEMDA Kabupaten Jeneponto)
2. Tahun 2008, 20 dokumen RPJMDes (Co Sharing ACCESS dan PEMDA Kabupaten Jeneponto)

3. Tahun 2009, 17 dokumen RPJMDes dan Media (Co Sharing ACCESS, PEMDA Kab. Jeneponto dan Mitra Turatea)

Bagaimana untuk melakukan assessment dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan ACCESS dengan Co Sharing untuk 113 desa di Jeneponto. Tahun 2009, Replikasi model dan (Scaling Up) perluasan perencanaan strategi desa. Tahun 2010, Internalisasi dan memperkuat proses perencanaan partisipatif (dan model ini akan dijadikan model tingkat nasional oleh Pemerintah Pusat (BAPPENAS)

2.1.4 BAPPEDA Jeneponto (Bpk. Suleman Natsir)



Senapas dengan yang disampaikan Rahmat dari Mitra Turatea Jeneponto, bahwa sesungguhnya ACCESS bekerjasama dengan pemerintah kabupaten tidak hanya kepada Mitra Turatea, tetapi saat ini ada 4 program yang siap dilaksanakan oleh berbagai LSM dan pemerintah kabupaten akan mendukung.

Sesungguhnya apakah ada Support dari ACCESS seharusnya memang pemerintah harus mendorong ini, karena memang

sudah ada aturan untuk melakukan RPJMDes dan RKPDesa, seharusnya perencanaan yang ada di desa merujuk pada RPJMKabupaten. RPJMDesa itu akan menjadi induk perencanaan pembangunan di Desa. Begitu juga jika ada program yang masuk di desa maka harus merujuk pada RPJMDes. RPJMDes ini tidak mesti difasilitasi oleh kabupaten, tetapi jika sudah mandiri ya silahkan melakukan sendiri RPJMDes.

Hasil dari peta sosial yang dilakukan oleh teman-teman dari Mitra Samya (LSM) dari Nusa Tenggara Barat, sebagai pilot project. Dan hasil pemetaan sosial ini akan menjadi rujukan dari semua program yang dilakukan di Jeneponto. Dan Kemeterian Kesejahteraan Rakyat melakukan Gerbang Kesejahteraan Rakyat (Gerakan Nasional) model dari Jeneponto, tahun 2008 kami melakukan kerjasama 20 desa oleh ACCESS dan 10 Desa oleh Pemda. Tahun 2010 ini, Pemda menganggarkan 10 desa dan diharapkan 25 desa oleh ACCESS. Hingga tuntas tahun 2010.

2.2 Catatan Fasilitator/Moderator:

BUMDes lahir tahun 2008 belum, cukup 2 tahun, namun ada sejumlah kekuatan dari pembentukannya:

1. kekuatannya BUMDes terbentuk dengan keterlibatan masyarakat.
2. Keterlibatan para pihak tidak hanya pemerintahnya tetapi juga orangnya yang pas.
3. Fasilitator telah dipersiapkan

4. SKPD-SKPD yang mendukung
5. Regulasi-regulasi yang mendukung
6. BUMdes jauh lebih baik dibanding lembaga lain.

Jeneponto Mitra Turatea: mengapa perencanaan partisipatif penting,

1. Secara politis negara ini telah merubah paradigim negara
2. Dilegitimasi dengan peraturan dan kalau sudah berbentuk peraturan maka harus dilaksanakan
3. Hanya dengan partisipatif masyarakat, pembangunan akan berkelanjutan.
4. Secara efektifitas dipastikan program tidak tumpang tindih

BAPPEDA Jeneponto,

1. Bahwa program yang ada di Jeneponto tidak hanya program yang dilakukan oleh Mitra Turatea, ada juga yang namanya Jeneponto Go Green, Ekonomi produktif, dll.
2. Sudah ada aturan oleh karena itu mutlak dilaksanakan, dan lebih menguntungkan lagi ada ACCESS yang membatu sehingga mempercepat pelaksanaan pendampingan dan perampungan RPJMDes.
3. RPJMDes akan menjadi payung di desa, tidak boleh ada program jika tidak mengacu pada RPJMDes.

2.3 Tanggapan Peserta

Usai presentasi narasumber, kemudian moderator mempersilahkan peserta untuk memberikan tanggapan. Beberapa tanggapan yang dapat dicatat adalah sebagai berikut:

2.3.1 Ibrahim Wahid – Gowa, menyangkut perencanaan ada pergeseran yang terjadi, lebih bernuansa Bottom Up, Dalam proses perencanaan masyarakat harus aktif – dalam perencanaan pemerintah fasilitator - perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan. Dalam musrenbang; masyarakat malas, karena tidak semua usulan dapat direspon, dan tidak ada evaluasi setiap tahun.

Untuk Jeneponto; Berapa persen usulan yang diakomodir dikabupaten. Apa ada perda perencanaan partisipatif.

Bumdes; ada uang, apakah betul Bantaeng mengalokasikan 100 juta untuk 1 BUMDes.- bagaimana pola pembinaan yang dilakukan Bantaeng - berapa persen keberhasilan BUMDes menekan rentenir di Bantaeng- bagaimana itu desa mandiri.



2.3.2 Salmia – Maros, didalam memulai sesuatu persoalan ada banyak kendala yang dihadapi baik NGO. BUMDes yang dibentuk di Desa itu tujuan untuk memutus rentenir, apakah ada simpan pinjam - Pendamping itu, dari mana modal yang diperoleh untuk mempersiapkan pendamping, - bagaimana teknik merekrut pendamping - Kenapa bukan lembaga yang sudah ada di Desa yang diberdayakan ? - RPJMDes tadi, sepertinya ada perbedaan antara Desa dengan Kabupaten. Kalau di Desa pemanen, tetapi kalau di Kabupaten tergantung Bupati yang terpilih. – Musrenbang itu, sudah enggan dilaksanakan, sebab di Desa masih bagus, kecamatan bagus, tetapi tidak direspon dikabupaten, - masyarakat miskin selalu diukur dengan uang, tetapi pendidikan tidak disentuh.



3.3.1 Prayitno – Maros, Perencanaan tahun 2003 kami sudah membuat perencanaan partisipatif, UU partisipatif yang ada tahun 2004. Isi RPJMDes adalah daftar keinginan, kami ingin melihat isi RPJMDes dari Jeneponto. Masalah pola pikir perencanaan dari Buttom Up, maka paradigma yang penting adalah Top Down polisi dan Buttom Up perencanaan.

BUMDes, - kami di Maros sering sekali memberikan dana bergulir tetapi akhirnya habis, apa bedanya KUD dengan BUMDes.

2.3.3 Basri – Sinjai, RPJMDes khusus mengenai perencanaan desa untuk menyusun RPJMDes, kegiatan semacam ini juga dilakukan di Sinjai, juga sudah ada fasilitaor Desa, ada PERDA, hanya RPJMDes itu jauh dari harapan, kualitasnya sangat kurang, karena tidak memuat arah pembangunan desa, mau diarahkan kemana ini desa. Belum digali potensi desa mau dikembangkan desa itu, belum kelihatan status desa, misalnya swadaya desa. Kalau perencanaan sudah dikabupaten. Sudah pudar, itu tidak betul. Sebab usulan itu dilakukan sortir berdasarkan skala prioritas. BUMDes, bentuk bagaimana itu BUMDes sebab bupati sering meminta berikan laporan tentang

BUMDes. Cikal bakal saja yang perlu dilihat, kalau ada yang kelihatan cikal bakalnya, itu saja yang dibantu. Kalau yang ada di Bantaeng berdasarkan instruksi dari atas, logika kami terbalik. Seolah-olah dipaksakan (BUMDes)

2.3.4 Norma – Pinrang, 1) Apakah kabupaten Pinrang juga bisa kerjasama dengan ACCESS ? 2) Dalam melahirkan RPJMDes seperti di Jeneponto, kami juga akan melakukan RPJMDes disetiap Desa, kendalanya baru beberapa desa yang ada RPJMDes tetapi berbeda dengan Mitra Turatea. 3) Apakah kami bisa bermitra dengan Mitra Turatea.

2.3.5 Arsal – Wajo, RPJMDes - penyusunan RPJMDes ini adalah kewajiban kita semua, kami sejak tahun 2006 kemarin sudah mencoba menyusun RPJMDes, apakah sudah ada PERDA penyusunan perencanaan ini, di Wajo sudah ada PERDANYA, Kira-kira berapa persen usulan yang terakomodir dalam RAPBD Jeneponto. Bantaeng; kami belum mendengar kendala dalam penyusunan BUMDes dan berapa yang sudah terbentuk BUMDes.

2.4 Jawaban / Klarifikasi :

2.4.1 Bantaeng : ibu Meryani; banyak pertanyaan bahwa itu pembentukan BUMDes itu Top Down, ini BUMDes memang prosesnya pembentukannya dari bawah, dan kenapa program yang jaman dulu itu gagal, karena tidak berdasarkan usulan masyarakat. Seperti pertanyaan dari Maros, bahwa ini hanya sebagai kedok saja, itu tidak benar, karena ada sebagian yang masuk kedalam kas



desa. Bumdes yang mengusulkan, bukan kami yang melakukan, kalau kita punya sendiri maka kita akan merawatnya. BUMDes adalah milik masyarakat maka ada tanggungjawab untuk mengembangkannya. Memang ada dana untuk masing-masing BUMDes yang dianggarkan APBD Kabupaten sebesar Rp. 100 juta per BUMDes. Prosesnya sekarang sudah kami minta rekening lembaganya. Mekanismenya jangan dipersulit, kalau masyarakat butuh langsung ada.

Fasilitator yang direkrut untuk melakukan pendampingan pada BUMDes, BUMDes sangat berbeda dengan lembaga lain, karena prosesnya yang menitik beratkan pada musyawarah masyarakat.

Tambahan Ramlan; anggaran kegiatan, kenapa harus membentuk BUMDes bukan koperasi?

Proses pembentukannya adalah bagaimana masyarakat melakukan, pembentukannya dilakukan Bottom Up, dibuktikan diawali dengan identifikasi potensi ekonomi yang ada, untuk kemudian di fasilitasi. Anggaran; dari APBD kabupaten dan ACCESS, dan beberapa pelatihan dibantu oleh Propinsi.

BUMDes ini bergerak pada sektor pemberdayaannya tetapi juga pada ekonomi produktifnya. Keanggotaan BUMDes adalah masyarakat desa secara umum itulah yang membedakan BUMDes dengan KUD.

2.4.2 Mitra Turatea (Jeneponto)

Rencana partisipatif, tidak persis sama dengan Musrenbang, bagaimana melihat asset base yang ada di Desa, sebab fasilitasi untuk RPJMDes ini, dibutuhkan waktu 3 bulan untuk menyusun strateginya. **Salmia** - Pemahaman tentang RPJMDes cukup kecewa dengan pemikiran ibu yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa berdaya.

Bapak Prayitno; prosesnya yang berbeda.

Bapak Basri, prosesnya bapak lihat hasil kerja kami.

Ibu Norma, terima kasih, kalau selanjutnya kita akan diskusi lebih baik.

Bappeda Sulaeman; banyak yang berargumen ada yang merupakan asset base ada merupakan deposit base, bahwa memang keihatan sangat sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Oleh karena itu kita lakukan pendampingan.

Tentang RPJMDes; berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas Dokumen RPJMDes, 1) Document itu berdasarkan data, berdasarkan potensi desa 2) Perencanaan harus partisipatif, 3) Proses fasilitasinya sehingga tidak muncul daftar keinginan dalam RPJMDes itu. 4) Perlu metode /pendekatan asset base itu. 5) Perlu ada komitmen, dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, SKPD-SKPD. Sebuah RPJMDes adalah pendekatan kolaboratif, didalamnya ada Buttom Up, ada Top Down

2.5 Masukan dari KEMENDAGRI (Bp. Chandra Bhakti)

Usai presentasi hasil pembelajaran Perencanaan Partisipatif dan BUDes, acara dilanjutkan dengan presentasi dari KEMENDAGRI sebagai masukan kebijakan untuk peserta. Dalam sesi ini narasumber diwakili oleh Bp. Chandra Bhakti. Secara rinci, isi masukan adalah sebagai berikut:

Perspektif Sosial Budaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Partisipatif

1. Landasan Strategis



Konsiderans UU No. 32 tahun 2004 (huruf a) dijelaskan; pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Landasan Hukum

- a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b. PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa.
- c. PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.
- d. PP No. 79 tahun 2005 tentang Pend. Binwas, Pemda.
- e. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pemb. Urusan.
- f. PP No. 41 tahun 2007 tentang Ped. Sotk. Pemda.
- g. PP No. 19 tahun 2010 tentang tata cara laksana tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di Wilayah Propinsi.
- h. Beberapa Permendagri Produk DIT PA & SBM :
 - Permendagri No. 20 thn 2007 tentang Pedom. Pembent Komisi Penang. AIDS.

3. Visi dan Misi PMD DEP DAGRI

Visi “Terwujudnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Yang Dinamis, Kondusif, Mandiri Dan Sejahtera”

Misi adalah :

1. Menumbuh kembangkan dan mendayagunakan potensi adat istiadat, masyarakat;
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas peran perempuan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender di berbagai bidang Kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan sistim Ketahanan dan Manajemen Pemberdayaan Keluarga;
4. Meningkatkan dan memantapkan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembangan dan perlindungan tenaga kerja pedesaan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat;
6. Menumbuhkembangkan swadaya gotong royong dan kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat;

4. Kebijakan Strategis

1. Memantapkan kehidupan Sosbudmas sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.
2. Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai bidang kehidupan.
4. Meningkatkan Kualitas Fisik & Non Fisik penduduk & meningkatkan kemandirian Tenaga Kerja Pedesaan.
5. Meningkatkan & Memantapkan kuantitas & kualitas kesejahteraan sosial masyarakat.

5. Kemiskinan yang dihadapi

1. Kemiskinan struktural (akibat struktur yang belenggu masyarakat).
2. Kemiskinan absolut struktural (minus kebutuhan dasar hidup/standar minimum komunitas).
3. Kemiskinan natural (pemiskinan akibat SDA).
4. Kemiskinan moral (akibat perilaku).

6. Isu dan Agenda 2011

1. Integrasi PNPM Mandiri ke dalam pola manajemen pembangunan regular.
2. Pendistribusian bantuan PNPM Mandiri secara langsung kepada Daerah Kabupaten dan Kota.
2. BLM dan DOK, yang selama ini diberikan dalam kerangka Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Pusat, akan diwujudkan melalui bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) kepada Daerah Kabupaten/Kota.
3. Untuk program-program pilot akan tetap menggunakan Pola Tugas Pembantuan.

7. Harapan

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai moral, etika, budaya dan rasa gotong royong masyarakat, persaudaraan, kebangsaan serta meningkatnya peran dan tanggung jawab lembaga masyarakat (adat, agama, sosial) yang diharapkan dapat terhindar dari konflik horizontal dan vertikal.
2. Terjadinya kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik di desa maupun kota di berbagai sektor.
3. Menurunnya permasalahan sosial seperti HIV dan AIDS, Narkoba, Lansia, penyandang cacat dan penyakit sosial lainnya yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, bencana, dan faktor faktor lainnya.
4. Meningkatnya peran dan fungsi serta tanggung jawab keluarga sebagai pusat pembentukan penumbuhan dan pengembangan karakter anggota keluarga di bidang mental, spiritual, psikis melalui penyediaan kebutuhan dasar.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perdesaan dalam pemenuhan hidup sehari-hari.

8. Kesimpulan

1. Pemberdayaan ekosob masyarakat merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, swasta, termasuk para pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro.
2. Pemberdayaan ekosob masyarakat perlu terus dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*), dengan memanfaatkan 5 (lima) modal yang ada di dalam masyarakat, yaitu : *financial*

capital, human capital, natural capital, physical capital, dan social capital untuk melakukan transformasi sosial dan proses ke arah kehidupan yang lebih baik.

3. Perlu dipertimbangkan bahwa dalam konsep gotong royog, juga perlu dipikirkan, misalnya gotong royong pembuatan rumah, tidak semua orang yang datang untuk bekerja, tetapi ada beberapa yang datang untuk meramaikan, hal ini baik, akan tetapi pada akhirnya akan membebani yang punya rumah. Dan jika gotong royong kalau tiap hari mau makan apa keluarga. Oleh karena itu perlu dipikirkan dengan baik, dengan prinsip keseimbangan.

Usai presentasi, kemudian dilanjutkan dengan forum tanggapan dari peserta terkait dengan apa yang telah disampaikan, beberapa tanggapan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Mitra Turatea (Anto), PNPM

konsep tidak ada permasalahan, 2 tahun sebelumnya yang berbasis potensi dan masalah, karena berbasis masalah maka keluaran adalah berbau fisik, bukan pada peningkatan kapasitas. Kami mengidentifikasi apa potensi desa. Paradigmanya potensi dan tantangan. Di RPJM

Kabupaten tidak mengacu pada RPJM Des, apa yang harus dibuat pada musrenbang, untuk musrenbang desa bukan surat kepala desa tetapi peraturan Desa



2. Kaharuddin Muji (Wakil

dikembalikan di kabupaten, sebenarnya PTO yang ada di PNPM itu bagus, tetapi kalau 2011 adalah fasilitatornya adalah orang kecamatan di Kabupaten itu. Strategi sasaran KPMD, adalah tidak sesuai dengan kebutuhan, terlalu mengada-ada, terlalu banyak kader. Penyusunan RPJMDes di Gowa ada 23 LSM yang digunakan untuk memantau SKPD yang ada di kabupaten Gowa.

Kab.Gowa, Mudah-mudahan PNPM 2011



Bagaimana mengakomodir keinginan pemerintah Desa, kalau kita mau mengintegrasikan musrenbang Kecamatan.

3. **Nurlinda (FIK-KSM) Kab.Takalar**, untuk kegiatan kerjasama dengan ACCESS kami baru calon, PNPM sangat bagus sebagai konsep Nasional, apakah pihak pemilik anggaran pernah memikirkan sebuah metode evaluasi yang melihat secara utuh semua program. Tetapi sebagai orang hidup berintegrasi dengan masyarakat, ketika masyarakat ikut merumuskan diharapkan masyarakat juga diharapkan ikut memutuskan. Contoh di desa saya, desa yang tidak pernah banjir, begitu ada PNPM dibuatkan drainase sampai kepantai, tetapi sekarang ini, masyarakat tidak punya air bersih, karena air laut masuk melalui drainase.

4. Mengapa hanya 4 kabupaten yang bermitra dengan ACCESS ?

Umpan Balik dari Bp. Chandra Bhakti:

1. PNPM secara konsep bagus, tetapi perlu diingat ini dilakukan by proses, sebelum PNPM ada program desa tertinggal, dll, ketika ini dinilai prosesnya cukup bagus sehingga diangkat menjadi program nasional. Saya kira perilaku kita sebagian yang nawaetunya (niat) perlu diperbaiki, sebut saja fasilitator juga ada yang niatnya kurang bagus, PNPM 2006, memang menginventaris masalah, tahun 2009 ini sudah menginventarisir potensi
2. PTO pada PNPM bagus, apakah ini bisa kita lakukan di 2011, tetapi niat baik, visi kita yang baik ini, kita sudah angkat, semoga daerah bisa menangkap ini dengan baik. Untuk penyusunan RPJMDes Kabupaten Gowa telah melakukan itu, dan kabupaten Gowa satu-satunya kabupaten yang mengotrol SKPDnya diberikan NGO, semoga ini bisa menjadi contoh di Indonesia. Ini kita berharap ACCESS mengambil peran yang besar.
3. Konsep PNPM itu bagus, tetapi implementasi tidak bisa kita katakan implementasinya jelek, bahwa cukup banyak pertanyaan bahwa waktu pelibatan perempuan masih dalam kategori mobilisasi perempuan. Dan ini kita akan terus lakukan perbaikan.

Betul sekali bahwa 100 % anggaran yang ada harus responsif gender.

Tanggapan Termin kedua:

1. **Paramis - Bappeda Pangkep**, Pangkep ada dana pendamping, masuk dalam pembantuan, sehingga kami tidak mampu mendeteksi langsung berapa dana yang harus kita usulkan, kiranya BPM pusat bisa jelaskan tentang sharing dana itu, jika ditempatkan di BPM akan lebih baik.

Musrenbang untuk melahirkan RPJMDes, dilaksanakan PNPM karena ada dananya.



2. **Salim Sadam - BPM Pare-pare**, untuk program PNPM sarasannya adalah pedesaan konsepnya ada pada pedesaan, untuk dikota dikelola oleh PU. Mengapa tidak diberikan juga kota tetapi melalui departemen dalam negeri. ACCESS perlu juga berpikir untuk beberapa kabupaten. Tidak hanya 4 kabupaten di Sulawesi Selatan.

Klarifikasi dari Bpk. Candra Bhakti :

1. Jadi setiap program yang masuk itu, seharusnya melapor pada PMD, agar supaya kita bisa memonitor perkembangan program itu.
2. Kami pada prinsipnya setuju jika ACCESS bisa masuk pada kota-kota yang lain, termasuk di Pare-pare.

2.6 Diskusi Kelompok



Setelah peserta lebih faham tentang hasil-hasil program lewat pameran serta mendapatkan pemaparan dari Narasumber dan masukan dari KEMENDAGRI, fasilitator kemudian mengajak peserta untuk melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini bertujuan untuk membuka wawasan peserta tentang pengalaman baru terkait pembangunan partisipatif. Peserta dibagi dalam 5 kelompok dan setiap kelompok harus mewakili adanya peserta dari pemkab dan mitra LSM. Dalam diskusi

kelompok, fasilitator memberikan panduan diskusi agar hasil dapat terfokus, berupa pertanyaan kunci, yakni:

1. ***Manfaat apa sajakah yang diperoleh dari perencanaan partisipatif dan pengelolaan BUMDes***
2. ***Apa saja yang dipandang perlu dan mendesak yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dikabupaten masing-masing***

Catatan setiap point pertanyaan akan diberikan jawaban minimal 3

Usai diskusi kelompok selama beberapa menit, kemudian setiap kelompok diminta untuk menunjuka wakilnya dan mempresentasikan hasil. Secara rinci hasil diskusi masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:



Kelompok 1 : Ir.Salwiah Ali (BPM PD Maros), H.Basri Rahman (BKM-PM Sinjai), A.Aris Irawati (BPM Propinsi SulSel), Thaiyeb M (BPM-PD Bulukumba), Paramis (Bappeda Pangkep), Luther T (Bappeda Tator), Diana SH (LSM), Kasmawati (LSM), Adwin Sutte (LSM)

Manfaat apa sajakah yang diperoleh dari perencanaan partisipatif dan pengelolaan BUMDes

1. Menambah wawasan perencanaan partisipatif dan

pengelolaan BUMDes.

2. BUMDes
3. Sharing pembelajaran antar Instansi, NGO tentang Perencanaan Partisipatif
4. Ada skala prioritas kegiatan dalam proses penyusunan rencana kegiatan masyarakat
5. Ada kepastian pendanaan
6. Strategi SKPD dalam mendukung BUMDes
7. Tidak bisa mengelola BUMDes tanpa modal (Modal menjadi sangat penting)

Rencana tindak lanjut:

1. Melaporkan hasil keatasan langsung tentang perencanaan partisipatif dan BUMDes dapat diterapkan.
2. Menginventaris potensi lokal desa
3. Sosialisasi dan berbagi pengalaman dengan teman kerja
4. Mengidentifikasi lembaga lokal dan memfasilitasinya untuk membuat ketertarikan mereka tentang aspek perencanaan partisipatif dan BUMDes

Kelompok 2: Muliawati (BPM Kota Makassar), Ibrahim Wahid (BPM Gowa), Benyamin T (BPM-PD Toraja), Herawati (Bappeda Kota Makassar), Sukmawati (BPM PD Pangkep), Muh.Nasrief M (BPM-PD Bantaeng), Yuliana (Bappeda Soppeng), Said Tarima (Bappeda Bantaeng), Ramlan(LSM), Akhriani Rahim(LSM), Muh Syahrir (LSM), Sulfiani (LSM), Asriudi Asman (LSM)



Manfaat apa sajakah yang diperoleh dari perencanaan partisipatif dan pengelolaan BUMDes

1. Ada informasi tentang peran ACCESS dalam membantu PEMKAB dan masyarakat dalam peningkatan kapasitas

2. Adanya gambaran visual yang dapat dilihat
3. Sharing pembelajaran dalam membuat dokumentasi kegiatan
4. Memperjelas peran KPM di Desa dan dapat diberdayakan pada semua program di Desa
5. Adanya perluasan dampak program
6. Ada apresiasi dan penawaran yang dari kabupaten lain untuk melakukan kegiatan yang sama

Rencana tindak lanjut:

1. Sosialisasi secara langsung dengan pengambil kebijakan di Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi dan membangun komitmen dengan para pihak, termasuk menghadirkan nara sumber dari daerah lain yang sudah bekerjasama ACCESS
3. Diharapkan BPMPD Propinsi untuk mensosialisasikan kepada lembaga donor untuk memfasilitasi/membantu proses perencanaan partisipatif dan BUMDes

Kelompok 3: H.Junaedi (BPMK Parepare), H.Abd.Karim (BPM-PD Takalar), Arsan (Bappeda Wajo), Norma (BPM-PD Pinrang), M.Annar Amir (Bappeda Parepare), Jati Sukarsa (BPM-PD Toraja Utara), A.R Maddapy (BPM-PD Sidrap), A.Sukri(LSM), Nuripa(LSM), Supriadi (LSM), Masrah (LSM), Syarifa Jum (LSM), Abd.Rahman (LSM)



Manfaat apa sajakah yang diperoleh dari perencanaan partisipatif dan pengelolaan BUMDes

1. Dalam perencanaan partisipatif dapat melahirkan dokumen 5 tahunan kedepan sehingga tidak tumpang tindih program kegiatan dari unit kerja/instansi
2. Mendapatkan pemahaman tentang penyusunan dokumen RPJMDes dan pengelolaan BUMDes sebagai bahan sosialisasi keberbagai pihak dikabupaten
3. Membuka ruang yang luas dalam penyusunan RPJMDes serta pemanfaatannya
4. Dengan adanya RPJMDes lebih memudahkan proses musrenbang
5. Mendiskusikan hasil pertemuan hari ini sebagai bahan perbaikan dilembaga kami (SKPD dan LSM)

Rencana tindak lanjut:

1. Mendapatkan dokumen RPJMDes dan BUMDes
2. Melakukan study banding ke Jeneponto dan Bantaeng
3. Memfasilitasi pertemuan terkait sosialisasi tahapan proses penyusunan RPJMDes dan BUMDes

Kelompok 4 : Irawati (BMP-PD Lutra), H.A. Hariyani (Bappeda Sinjai), A.Agussalim(BPM-PD Soppeng), Abu Bakar (BPM-PD Enrekang), Hj.A.Sudarmi, M (BPM-PD Bone), Prayetno (Bappeda Maros), Pasahakim (Bappeda Bulukumba), Bambang Sul (LSM), Syamsuddin (LSM), Husain Mabe (LSM), Abdul Hakim (LSM), Nurlinda (LSM)



Manfaat apa sajakah yang diperoleh dari perencanaan partisipatif dan pengelolaan BUMDes

1. Terlibatnya warga miskin, perempuan dan kaum marginal lainnya
2. Mengetahui potensi desa secara maksimal dan dapat dikelola secara maksimal
3. Menjamin keberlanjutan pembangunan ditingkat warga
4. Masyarakat lebih berperan aktif dalam proses perencanaan/implementasi
5. Menghindari tumpang tindih program

Rencana tindak lanjut:

1. Sosialisasi hasil rapat koordinasi ini
2. Memfasilitasi RPJMDes untuk menjadi induk/rujukan dalam musyawarah tahunan
3. Memfasilitasi pembentukan BUMDes dan pembuatan PERDES dan SK Pengurus
4. Mengusulkan kerjasama dengan ACCESS
5. Menyediakan anggaran untuk kegiatan pendampingan kelembagaan desa untuk pembentukan BUMDes

Kelompok 5: Sukirno(Bappeda Enrekang), M.Haris(Bappeda Sidrap), Masri (Bappeda Soppeng), A.Agus (BPM-PD Selayar), H.Jamaluddin (Bappeda Takalar), Sulaeman Natsir (Bappeda Jeneponto) Andi Irwan (LSM), Darmawan (LSM), Putri Ratu (LSM), Nurhayati Gaffar (LSM), Kaharuddin Muji (LSM), A.Rais Fatta (LSM)



Manfaat apa sajakah yang diperoleh dari perencanaan partisipatif dan pengelolaan BUMDes

1. Mendapat pengetahuan baru dan mendapat pengalaman
2. Memahami proses perencanaan partisipatif yang berbasis potensi SDA dan SDM
3. Tahapan perencanaan melahirkan sense of identification
4. Melahirkan rasa kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan

5. Melahirkan rasa memiliki pada pemanfaatan hasil
6. Melahirkan rasa ikut bertanggungjawab dalam pembangunan
7. Sumberdaya dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat
8. Sumber pendanaan penyelenggaraan desa bisa dimanfaatkan dari BUMDes
9. Meningkatkan ekonomi/kesejahteraan masyarakat
10. Efisiensi pengetahuan asset desa
11. Terwujud ketahanan ekonomi desa

Rencana tindak lanjut:

1. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam formulasi implementasi, dan evaluasi
2. Menyusun program kerja yang efektif dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat
3. Membentuk BUMDes sesuai dengan potensi dan sumber daya desa

2.7 Penutupan

Acara penutupan dilakukan oleh Bpk Andi Sukri, dari BPMPDK Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana kegiatan. Secara rinci apa yang disampaikan pada acara penutupan adalah sebagai berikut:



Saya apresiasi kepada ACCESS karena telah bekerjasama dengan BPMPDK Sulawesi Selatan untuk bersama-sama sharing pembelajaran apa yang telah dilakukan di Kab Bantaeng dan Jeneponto, sehingga teman-teman jajaran BPMPDK, BAPPEDA dari kabupaten ada gambaran tentang RPJMDes dan BUMDes, dan menjadi pembanding dan bahan pembelajaran untuk dibawa pulang ke Kabupaten masing-masing.

Kami juga memberikan apresiasi kepada fasilitator Bpk Pahir Halim yang telah memberikan kita semacam alat untuk penyusunan perencanaan untuk tahun 2011. Sebagai amanah undang-undang bahwa RPJMDes di harapkan selesai tahun 2010. Dan mudah-mudahan tahun 2010 RPJMDes Sulawesi Selatan akan selesai.

Dan kepada teman-teman LSM kami juga menyampaikan banyak terima kasih, karena kami banyak belajar dari apa yang telah dilakukan khususnya teman dari Bantaeng dan Jeneponto. Demikian billahi taufiq walhidayah Assalamu alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

D. PESERTA PERTEMUAN

Peserta pertemuan koordinasi dan sharing pembelajaran ini sebanyak 73 orang dari yang direncanakan 80 orang (91,25 %), yang terdiri dari utusan BAPPEDA dan BPMPD. Beberapa kabupaten tidak sempat hadir. Sekalipun telah ditekankan pada saat koordinasi untuk memastikan keseimbangan peserta laki-laki dan perempuan, namun masih terjadi dominasi peserta laki-laki, yakni: 52 laki-laki (71,23 %) dan perempuan 21 orang (28,77 %). Rincian peserta dapat diperhatikan dalam table berikut.

No	Unsur	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	BPMPDK	18 orang	14 orang	4 orang
2	BAPPEDA	13 orang	10 orang	3 orang
3	Mitra LSM	28 orang	18 orang	10 orang
4	ACCESS Sul-Sel	4 orang	2 orang	2 orang
5	Mitra Samya	2 orang	1 orang	1 orang
6	Narasumber	4 orang	3 orang	1 orang
7	Fasilitator	1 orang	1 orang	-
8	Panitia	3 orang	3 orang	-
Jumlah Total		73 orang	52 orang	21 orang

E. MODERATOR/FASILITATOR

Selama proses pertemuan, yang menjadi fasilitator adalah Bp. Andi Sukri dari BPMPDK Propinsi Sulawesi Selatan dan Bp. Pahir Halim, sebagai fasilitator utama.

Lampiran # 1

AGENDA PERTEMUAN

WAKTU	SESSI	FASILITATOR	KETERANGAN
HARI I			
12 00 – 12 30	Registrasi/ Check in	Pelaksana Tehnis	-
12 30 – 14 00	Makan Siang Bersama	Pelaksana Tehnis	-
14 00 – 15 00	Pembukaan - Sambutan ACCESS - Sambutan Pemprov sekaligus membuka	Moderator	-
15 00 – 15 30	Coffee break dan Istirahat		
15 30 – 17 00	Kebijakan Pemerintah tentang Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan	Moderator	
HARI II			
08 30 – 10 30	Sessi 1: 1. Pembelajaran Perencanaan Partisipatif CLAPP - GSI dari Kab Jeneponto dan Bantaeng 2. Pembelajaran Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 3. Pembelajaran dari kegiatan-kegiatan lain	Moderator	Hand Out sebagai informasi pendukung dibagikan
10 30 – 10 45	Coffee break		
10 45 – 12 00	Sessi 2: Diskusi kelompok (Pemda, LSM, Donor) – topic: apa manfaat utama dari proses perencanaan partisipatif, bagaimana KPM dpt lebih efektif dlm perencanaan partisipatif, bagaimana pemerintah daerah harus bertindak	Moderator	Hasil presentasi dan Pameran

	dlm mengkaitkan antara perencanaan desa - kabupaten - nasional.		
12 00 - 13 00	Ishoma		
13 00 - 15 00	Sessi 3: Rumusan komitmen peserta workshop untuk tindak lanjut dan pernyataan komitmen bersama.	Moderator	Catatan kesimpulan oleh Fasilitator
15 00 - 16 00	Coffee Break dan Penutupan		-